# **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

## 1.1. Latar Belakang

Pada awal mula perkembangan studi hubungan internasional, pola interaksi yang terjadi berupa diplomasi dan kerja sama yang sifatnya *high politics* dimana hanya melibatkan aktor negara dan isu utama seputar pertahanan dan keamanan negara. Namun seiring berkembangnya dinamika hubungan internasional, aktor yang terlibat dan isu yang yang menjadi perhatian dunia pun ikut berkembang. Studi hubungan internasional saat ini tidak hanya bersifat *high politics* namun juga bersifat *low politics*. Selain itu, isu-isu yang menjadi perhatian dalam hubungan internasional pun ikut berkembang, mulai dari isu ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, budaya, *gender*, maupun lingkungan hidup. Dalam hubungan antar negara itu sendiri, media komunikasi yang digunakan untuk negoisasi adalah diplomasi.

Djelantik (2008:13) menyatakan bahwa diplomasi merupakan implemententasi dari kepentingan nasional suatu negara yang disampaikan dalam kebijakan luar negeri negara tersebut. Secara persuasif, diplomasi bertujuan untuk merubah sikap atau perilaku lawan. Dalam konteks ilmu hubungan internasional, diplomasi digunakan suatu negara untuk merubah sikap negara lain sesuai dengan keinginannya. Sehingga, diplomasi dapat dikatakan sebagai sebuah cara bernegoisasi untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan. Diplomasi dapat dikatakan berhasil atau gagal tergantung dengan manajemen hubungan internasional yang dilakukan oleh perwakilan suatu negara di negara lain yang juga disebut dengan diplomat.

Diplomasi memiliki beberapa bentuk seperti diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, diplomasi preventif, diplomasi publik serta diplomasi ekonomi dan perdagangan. Dimana bentuk-bentuk diplomasi tersebut digunakan untuk menjelaskan berbagai isu dan fenomena dalam hubungan antar negara yang terjadi. Aktor yang terlibat dalam sebuah kesepakatan kerja sama ataupun diplomasi saat ini tidak hanya melibatkan negara, tetapi juga melibatkan aktor-aktor baru seperti

NGOs, MNCs, pemerintah daerah, bahkan individu. Munculnya aktor baru seperti pemerintah daerah memberikan warna baru dalam hubungan internasional modern.

Hubungan luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau 'sub-state' dalam ilmu hubungan internasional disebut sebagai paradiplomasi. Istilah paradiplomasi berasal dari kata 'parallel diplomacy' yang dikembangkan menjadi 'paradiplomacy'. Paradiplomasi dimaknai sebagai sebuah cara atau lebih tepatnya sebuah kebijakan luar negeri dari pemerintah daerah sebuah negara. Seperti halnya diplomasi, paradiplomasi juga mempunyai dua kecerendungan dalam hubungan internasional yaitu bersifat kerja sama ataupun konfliktual. Pada era sekarang ini, paradiplomasi menjadi sebuah titik perubahan dalam hubungan internasional dengan memanfaatkan pemerintah daerah dalam mencapai kepentingan nasional suatu negara (Mukti, 2015:86).

Konsep hubungan paradiplomasi ini mengacu pada model kerja sama yang berorientasi pada tujuan-tujuan seperti ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kesehatan, alih teknologi, dan sebagainya. Keterlibatan pemerintah daerah dalam hubungan internasional dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan kerja sama sister city. Kerja sama sister city merupakan persetujuan kerja sama antara dua kota, daerah setingkat provinsi, negara bagian atau prefektur yang memiliki satu atau lebih kemiripan karakteristik dimana dua daerah tersebut terdapat pada dua negara yang berbeda.

Sister city merupakan tradisi kemitraan yang didirikan untuk terus memainkan peran kunci dalam pemerintah daerah. Kota dari negara yang berbeda berkomunikasi satu sama lain melewati masing-masing pemerintah nasional dan negara mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagi informasi, pertukaran budaya, dan komunikasi lainnya yang dapat membantu memecahkan banyak masalah umum seperti lalu lintas, kemiskinan, dan kesehatan (Farazmand, 2004:89).

Kerja sama *sister city* di Indonesia sudah muncul pada tahun 1960-an. Dengan berbagai motivasi di awal munculnya kegiatan kerja sama tersebut, namun yang utama adalah karena banyak didorong oleh kesamaan, misalnya Kota Jakarta banyak melakukan kerja sama dengan berbagai kota di seluruh dunia dengan alasan seperti kesamaan kota administratif tingkat I atau sama-sama sebagai ibukota

negara. Ini dapat terlihat dari kerja sama *sister city* yang dijalin oleh Kota Jakarta dengan Kota Hanoi, Berlin, Pyongyang, Seoul, Tokyo, dan kota lainnya yang umumnya merupakan ibukota negara atau kota administratif tingkat I.

Selain Jakarta, kerja sama sister city juga dilakukan oleh kota-kota lain di Indonesia, salah satunya adalah Kota Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu kota di Indonesia yang melakukan kerja sama dengan kota lain di luar negeri, serta dapat dikatakan sebagai kota yang turut aktif berperan dalam kegiatan city to city collaboration atau yang sering disebut dengan bentuk kerja sama sister city. Kota Semarang merupakan ibukota dari propinsi Jawa Tengah dan sebagai kota yang memiliki keunggulan baik secara komparatif maupun kompetitif. Kota Semarang juga memiliki fasilitas yang memadai sebagai kota metropolitan seperti dalam hal transportasi, pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, kawasan bisnis, dan sebagainya. Tersedianya transportasi baik darat maupun udara telah memberikan kemudahan akses untuk berkunjung ke Kota Semarang, secara domestik dan internasional. Sehingga tidak mengherankan bila Kota Semarang banyak menjalin kerja sama sister city dengan kota-kota lain di seluruh dunia dalam rangka pembangunan ekonomi kotanya maupun pembangunan di sektor-sektor lainnya.

Pelaksanaan kerja sama sister city di Kota Semarang pertama kali dilakukan dengan Kota Brisbane, Australia pada tahun 1993. Bagi Semarang, kerja sama sister city antara Kota Semarang dan Brisbane ini merupakan bentuk kerja sama sister city yang bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama yaitu 26 tahun. Selain dengan Kota Brisbane, Australia, Kota Semarang juga melakukan kerja sama sister city dengan kota lain, seperti Nanjing, Junggu serta Toyama.

Inisiasi adanya kerjasama ini dimulai dari kegiatan pelatihan terkait pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi yang diselenggarakan oleh *Institute Global Strategies for Environment* (IGES) pada bulan November 2013 di Gedung UNEP Tokyo. Kegiatan tersebut menghasilkan sebuah diskusi yang menawarkan kerjasama dan pembuatan proposal resmi. Hal ini menghasilkan sebuah *Memorandum of Understanding* (M.O.U) atau Persetujuan Kerjasama Joint Crediting Mechanism (JCM) antara Indonesia dan Jepang yang ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2013 oleh Menteri Luar Negeri, Mr. Fumio Kishida dan pada 26 Agustus 2013 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa.

Jepang adalah salah satu negara yang sangat peka terhadap masalah lingkungan seperti pencemaran ataupun peningkatan emisi karbon di dunia. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Jepang dari Protokol Kyoto pada tahun 2010 dikarenakan ketidakefektifan program dan hasil kerjasama tersebut. Jepang mulai mengembangkan skema *Joint Credit Mechanism* (JCM) sebagai langkah baru dalam memperbaiki lingkungan khususnya dalam pengurangan emisi karbon. *Joint Credit Mechanism* (JCM) sendiri adalah mekanisme kerjasama bilateral terkait perdagangan karbon yang mencakup aspek transfer teknologi. Kerjasama ini berbentuk pemberian insentif negara maju kepada negara berkembang sehingga diharapkan dapat membantu pengembangan investasi hijau dan pembangunan rendah emisi di kedua negara tersebut (Kementerian Lingkungan Hidup, 2014).

Program *Joint Crediting Mechanism* (JCM) merupakan sebuah langkah untuk mendukung proyek-proyek pengurangan emisi yang dilakukan negara-negara maju ataupun berkembang dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan. Aktivitas JCM direalisasikan dengan meliputi berbagai sektor seperti energi baru terbarukan, reboisasi hutan, efisiensi energi, penanganan dan pembuangan limbah serta industri manufaktur. Melalui skema JCM, Jepang mendorong kesadaran dan kerja nyata negara-negara berkembang, khususnya Indonesia untuk lebih aktif dalam menangani permasalahan lingkungan. Dengan JCM, kegiatan industri yang dijalankan diharapkan berkembang dengan teknologi modern ramah lingkungan tanpa menghilangkan nilai-nilai konvesional yang ada.

Kerja sama JCM ini juga merupakan salah satu kerja sama yang penting bagi Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2009, secara nasional Indonesia hanya memberikan sumbangsih sebesar 26% dan dengan bantuan subsidi internasional sebesar 41% dalam pengurangan emisi dunia. Dengan *track record* seperti ini, diprediksi Indonesia pada tahun 2020 tidak memberikan sumbangsih sama sekali dalam penurunan emisi di dunia. Oleh karena itu, kerja sama JCM merupakan kerja sama yang cukup populer di Indonesia dikarenakan ranah kerja sama tersebut sudah mencapai pemerintah masing-masing kota di Indonesia sehingga diharapkan adanya langkah bertahap serta konsisten dalam penurunan emisi yang dilakukan Indonesia.

Kerja sama Indonesia-Jepang dalam skema JCM juga dibentuk dalam konsep sister city atau city to city collaboration, salah satunya yaitu antara Kota Semarang, Indonesia dengan Kota Toyama, Jepang. Seperti yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI) kerja sama sister city Kota Semarang, Indonesia dengan Kota Toyama, Jepang ini fokus pada pengelolaan energi terbarukan dan transportasi publik dalam skema JCM. Kerja sama ini disepakati pada 14 Desember 2017 di Toyama oleh Walikota Semarang, Hendrar Prihadi serta Walikota Toyama, Masashi Mori.

Kerja sama Kota Semarang, Indonesia dengan Kota Toyama, Jepang diharapkan membawa perubahan dan perkembangan terkait angka pengurangan emisi bagi Indonesia. Sebagai timbal baliknya, Jepang akan membantu Indonesia dalam hal penerapan teknologi khususnya dalam bidang energi agar tercipta suistainable city and environment yang secara tidak langsung juga akan membantu peningkatan pembangunan dan penyerapan sumber daya manusia di Kota Semarang, Indonesia.

Kerja sama ini dicanangkan oleh Pemerintah Kota Semarang karena ingin membangun citra Kota Semarang sebagai *smart city*. Untuk mencapai citra tersebut perlu adanya gerakan program baru serta pembaharuan dalam beberapa bidang seperti pemerintah, ekonomi, sosial, *branding*, dan lingkungan. Khususnya dalam membangun citra *smart environment*, Pemerintah Kota Semarang mempunyai program-program dalam membangun lingkungan seperti pada jalan, sungai, menara serta transportasi publik. Program dan proses yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk membangun citra *smart city* dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui Website Resmi yang disediakan Pemerintah Kota Semarang secara khusus.

Oleh karena itu, Semarang membutuhkan kota lain, khususnya bantuan dari negara maju untuk mendukung perubahan atas kerusakan lingkungan yang dialaminya. Keputusan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kota Toyama dilatarbelakangi oleh kesuksesan Kota Toyama yang berdiri sebagai kota industri teknologi ramah lingkungan dengan berbagai pencapaian teknologi-teknologi yang canggih yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan lokal daerah tersebut. Toyama sendiri dikenal sebagai salah satu kota

terpadat di Jepang yang sukses dalam menyeimbangkan kegiatan industri dengan kelestarian lingkungannya.

Kesuksesan Toyama dilatarbelakangi oleh beberapa penghargaan internasional terkait lingkungan yang diberikan kepada Kota Toyama. Dengan perkiraan jumlah penduduk sebesar 417.878 pada Februari 2018, Toyama mendapatkan penghargaan sebagai Eco Model City (2008), Future City (2011), dan SDGs Future City (2018). Pemerintah Kota Toyama juga begitu konsisten dengan implementasi kebijakan utama bagi lingkungan yaitu kota dengan lingkungan tersusun dilihat dari sektor transportasi dan energi baru terbarukan. Pemerintah Kota Toyama juga banyak melakukan kerja kepada sudah sama Organisasi/Lembaga Internasional ataupun dalam skema kerja sama antar kota. Hal inilah yang meyakini bahwa Kota Toyama dapat menjadi contoh serta mitra kerja sama yang tepat bagi Kota Semarang untuk melaksanakan pembangunan ramah lingkungan khu<mark>susnya dalam sektor transportasi yang efektif</mark> bagi perkembangan kota.

Kerjasama Sister City Kota Semarang, Indonesia dengan Toyama, Jepang ini diharapkan juga dapat memberikan hasil terhadap pengurangan emisi melalui sektor transportasi publik serta membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Semarang. Sudah menjadi rahasia umum apabila masyakarakat Jepang bekerja dengan dasar kata "konsisten", begitu juga dengan masyarakat Kota Toyama. Dengan adanya kerjasama ini, sumber daya manusia di Kota Semarang diharapkan dapat bekerja lebih efektif lagi dengan disiplin waktu yang diterapkan.

Dalam periode 2017-2018, kerja sama *sister city* Kota Semarang, Indonesia dengan Kota Toyama, Jepang ini bergerak secara linear dan cepat. Salah satu program yang sudah terlaksana adalah implementasi transportasi publik *Bus Rapid Transit* (BRT) Trans Semarang dengan bahan bakar dasarnya yaitu *Compressed Natural Gas* (CNG) bukan dengan bahan bakar minyak. Pelaksanaan program transportasi publik berbasis CNG ini berada dalam skema JCM, dimana transportasi publik ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon serta memberikan sumbangsih terhadap kewajiban Indonesia dalam menurunkan emisi.

Output Kerjasama Sister City Kota Semarang, Indonesia dengan Kota Toyama, Jepang ini menjadi landasan dasar Pemerintah Kota Semarang membangun *smart city with smart environment*. Kerja sama Sister City Kota Semarang, Indonesia dan Toyama, Jepang masih terus bergerak linear. Hal ini dibuktikan dengan bertolaknya Walikota Semarang, Hendrar Prihadi ke Toyama pada 14 Desember 2018 dengan tujuan memperkuat program-program kerja sama *sister city* Semarang-Toyama dalam pertemuan *Inter-City Collaboration Forum*. Pertemuan ini mendiskusikan program selanjutnya seperti yang tertuang dalam LoI Semarang-Toyama yaitu berkaitan dengan pengembangan energi baru terbarukan di Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, adanya beberapa kesamaan antara Kota Semarang, Indonesia dengan Kota Toyama, Jepang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait model kerja sama *sister city* ini. Ketertarikan penulis berfokus pada analisa implementasi kerja sama *sister city* Kota Semarang, Indonesia dengan Kota Toyama, Jepang dalam skema *Joint Credit Mechanism* (JCM) periode 2017-2018 serta dinamikanya.

#### 1.2. Rumusan Masalah

Kerja sama Sister City antara kota Semarang, Indonesia dengan kota Toyama, Jepang telah menujukkan perubahan konstelasi hubungan internasional dengan melibatkan aktor *sub-state*. Hal ini membawa pengaruh kepada masing-masing negara, khususnya di bidang energi dan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pertanyaan penelitian: "Bagaimana kerja sama *sister city* Semarang, Indonesia dengan Toyama, Jepang dalam skema *Joint Credit Mechanism* (JCM) pada periode 2017-2018?"

### 1.3. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisa implementasi program kerja sam*a sister city* Semarang-Toyama berdasarkan tujuan yang telah disepakati kedua kota selama periode 2017-2018 dalam skema *Joint Crediting Mechanism* (JCM).

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut terkait keefektifan implementasi kerja sama *sister city* berdasarkan tujuan melaksanakan kerja sama *sister city* dengan daerah atau kota dari negara lain.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan di tingkat daerah atau kota terkait implementasi kerja sama sister city Kota Semarang-Toyama dalam Low Carbon Development khususnya Kota Semarang yang sedang membangun kota yang lebih efektif, modern dan humanis dengan konsep smart city.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan: Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

NGUNANA

**Bab II Tinjauan Pustaka:** Bagian ini berisi uraian mengenai *literature* review, kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi.

Bab III Metode Penelitian: Bagian ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan: Menjelaskan mengenai kerjasama sister city Kota Semarang, Indonesia dengan Kota Toyama, Jepang dalam skema Joint Credit Mechanism (JCM). Menjelaskan hubungan antara skema kerjasama tersebut dengan program Low Carbon Development atau pengurangan emisi karbon. Serta menjelaskan implementasi kerjasama tersebut dalam periodisasi tahun 2017-2018.

**Bab V Kesimpulan:** Pada bagian terakhir laporan ini akan berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjelaskan hasil penelitian yang disimpulkan dari penjelasan pada bab-bab terdahulu.